

Analisis Dampak Kebijakan Smart Region terhadap Pembangunan Daerah Di Kota Sorong

Julitha Dorianche Semunya¹, Saiful Ichwan

^{1,2}Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara. FISIP.Universitas Muhammadiyah Sorong.

Email: ichwan.ipul@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the Smart Region policy on regional development in Sorong City. Smart Region is defined as a regional development approach that integrates digital technology, smart governance, and public innovation to enhance the efficiency of public services, economic growth, and community participation. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews with local stakeholders (local government, community, and private sector) as well as policy document analysis. The results of the study show that the implementation of the Smart Region policy in Sorong has had a positive impact, including increased efficiency in public services, increased Local Revenue (PAD), and improved digital infrastructure quality. However, there are significant challenges, such as digital infrastructure gaps in several parts of the city, limited technical capacity of officials, and uneven community participation. This study concludes that the Smart Region policy can be a key driver of sustainable development in Sorong City, provided it is supported by inclusive strategies and equitable investment in digital infrastructure.

Keywords: Policy Impact, Smart Region, Regional Development, Sorong City

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan *Smart Region* terhadap pembangunan daerah di Kota Sorong. *Smart Region* diartikan sebagai pendekatan pembangunan wilayah yang mengintegrasikan teknologi digital, tata kelola pintar (*smart governance*), dan inovasi publik untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara para pemangku kepentingan lokal (pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta) serta analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *Smart Region* di Sorong memberikan dampak positif berupa kenaikan efisiensi pelayanan publik, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan peningkatan kualitas infrastruktur digital. Namun, terdapat tantangan signifikan, seperti kesenjangan infrastruktur digital di beberapa wilayah kota, kapasitas teknis aparatur, dan partisipasi warga yang belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan *Smart Region* dapat menjadi pendorong utama pembangunan berkelanjutan di Kota Sorong, apabila disertai dengan strategi inklusif dan investasi yang merata dalam infrastruktur digital.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Smart Region Pembangunan Daerah, Kota Sorong

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. Di era digital, inovasi teknologi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pembangunan yang efisien dan inklusif. Salah satu pendekatan yang kini

diadopsi oleh pemerintah daerah adalah konsep *Smart Region*, yang merupakan perluasan dari konsep *Smart City*. *Smart Region* tidak hanya menekankan digitalisasi layanan publik di pusat kota, tetapi juga integrasi teknologi dan inovasi di seluruh wilayah administratif untuk mendorong pemerataan pembangunan.

Kota Sorong, sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Papua Barat, menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kesenjangan sosial-ekonomi, dan perlunya peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah Kota Sorong telah mulai menerapkan kebijakan *Smart Region* dengan tujuan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi.

Namun, penerapan kebijakan ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti disparitas akses terhadap teknologi di wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan kapasitas aparatur dalam mengelola sistem digital, serta adaptasi masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis dampak kebijakan *Smart Region* terhadap pembangunan daerah, khususnya untuk memahami sejauh mana kebijakan ini berhasil meningkatkan pelayanan publik, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat di Kota Sorong.

Era digitalisasi mendorong transformasi pemerintahan dan pembangunan daerah melalui konsep *smart city* atau *smart region*. Di Indonesia, banyak kota dan kabupaten mulai mengadopsi kebijakan *smart governance* untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kota Sorong, sebagai salah satu kota di Provinsi Papua Barat, menghadapi tantangan pembangunan lokal: keterbatasan infrastruktur, disparitas sosial, dan kebutuhan untuk modernisasi pemerintahan. Dengan menerapkan kebijakan *Smart Region*, pemda Sorong berpotensi mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji dampak kebijakan *Smart Region* di Sorong, sehingga penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Smart Region / Smart City

Smart City sering didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup warga, efisiensi pemerintahan, dan pembangunan ekonomi. Dimensi *smart city* biasanya meliputi: *smart governance*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, *smart environment*, dan *smart branding*. *Smart governance* menekankan pelayanan publik berbasis digital, partisipasi masyarakat, transparansi, dan efisiensi birokrasi.

2. Dampak Infrastruktur Digital pada Pertumbuhan Ekonomi Regional

Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur digital (misalnya jaringan internet, broadband) memiliki efek positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Efek ini tidak hanya bersifat langsung (daerah yang lebih maju secara digital tumbuh lebih cepat), tetapi juga melalui *spatial spillover effects*: daerah tetangga juga mendapat manfaat dari infrastruktur digital di wilayah maju.

3. Kebijakan Inovasi Regional dan Daya Saing Daerah

Kebijakan inovasi regional (regional innovation policy) dapat meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Dalam konteks digitalisasi, *smart city* / *smart*

region merupakan salah satu pendekatan kebijakan inovatif yang dapat memperkuat kapabilitas pemerintah lokal dan mempercepat transformasi pembangunan.

4. Analisis Biaya-Manfaat Kebijakan Smart City

Analisis cost-benefit penting untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan *Smart City / Smart Region*. Sebagai contoh, suatu studi di Indonesia menunjukkan bahwa platform tunggal smart city mampu meningkatkan efisiensi pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial dibanding biaya operasional. Namun, perlu diperhatikan risiko seperti “kelelahan aplikasi” (*application fatigue*), di mana banyak instansi pemerintah membuat aplikasi tetapi penggunaan kurang maksimal, yang mengurangi manfaat kebijakan.

5. Tantangan Implementasi Smart Governance di Negara Berkembang

Sistem pemerintahan digital di negara berkembang menghadapi kendala: biaya tinggi, kesenjangan digital, regulasi yang lemah, dan kapasitas aparatur pemerintahan. Untuk mengatasi itu, diperlukan reformasi kelembagaan, penguatan regulasi, pembangunan kapasitas manusia, dan peningkatan inklusivitas digital agar smart governance bisa berjalan efektif.

6. Konteks Lokal (Kota Sorong / Papua)

Pentingnya kontekstualisasi kebijakan *Smart Region* di Sorong karena karakteristik lokal: disparitas sosial-ekonomi, geografis, dan infrastuktur. Penelitian lokal terkait kebijakan pemerintah di Sorong, seperti pemanfaatan dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur dasar di distrik Aimas, menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dan prioritas lokal. Selain itu, analisis dampak pemekaran daerah juga relevan untuk memahami dinamika pemerintahan lokal di Sorong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan unsur evaluatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan *Smart Region* terhadap pembangunan daerah di Kota Sorong secara mendalam, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik berbasis digital

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan *Smart Region* di Kota Sorong dirumuskan dan diimplementasikan?

1. Perumusan Kebijakan Smart Region di Kota Sorong

Berdasarkan data wawancara dengan pejabat pemerintah daerah dan analisis dokumen kebijakan, perumusan kebijakan *Smart Region* di Kota Sorong dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

a. Identifikasi Kebutuhan Daerah

Pemerintah Kota Sorong mengidentifikasi kebutuhan utama pembangunan daerah, termasuk efisiensi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur digital, serta penguatan ekonomi lokal berbasis teknologi. Fokus kebijakan ditentukan melalui survei internal, masukan masyarakat, dan analisis kelemahan sistem pemerintahan yang ada.

b. Penyusunan Dokumen Strategi

Dokumen perencanaan *Smart Region* disusun oleh Dinas Kominfo bekerja sama dengan Bappeda dan instansi terkait. Strategi ini memuat enam dimensi utama *Smart Region*: *smart governance, smart economy, smart society, smart environment, smart living*, dan *smart branding*. Dokumen mencakup target jangka pendek (peningkatan

layanan administrasi dan digitalisasi data), jangka menengah (peningkatan ekonomi berbasis digital), dan jangka panjang (pembangunan infrastruktur pintar kota).

- c. Konsultasi Publik dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kota Sorong melakukan konsultasi publik untuk menyesuaikan rencana kebijakan dengan aspirasi Masyarakat, Sinkronisasi dilakukan dengan pemerintah provinsi Papua Barat agar kebijakan *Smart Region* Kota Sorong selaras dengan pembangunan regional dan strategi nasional *smart city*.

2. Implementasi Kebijakan Smart Region di Kota Sorong

Pelaksanaan kebijakan *Smart Region* di Kota Sorong dilakukan melalui beberapa langkah operasional:

- a) Digitalisasi Layanan Publik; Penerapan sistem administrasi berbasis digital pada pelayanan kependudukan, perizinan, dan pajak daerah, Implementasi *One Stop Service* berbasis online untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah.
- b) Pengembangan Infrastruktur Teknologi: Peningkatan jaringan internet dan akses Wi-Fi publik di kantor pemerintahan, sekolah, dan pusat pelayanan public, Pembuatan portal informasi pemerintah daerah yang terintegrasi (*integrated e-government portal*).
- c) Pelatihan Aparatur dan Sosialisasi Masyarakat; Aparatur pemerintah diberikan pelatihan mengenai penggunaan sistem digital dan manajemen data, Masyarakat diberikan edukasi mengenai cara menggunakan aplikasi layanan publik secara daring.
- d) Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Akademisi; Pemerintah Kota Sorong bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi, start-up lokal, dan perguruan tinggi untuk inovasi layanan digital dan pengembangan smart application.

3. Dampak Implementasi

Hasil implementasi menunjukkan beberapa dampak signifikan:

- a. Positif: Peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan public, Masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan pemerintah, Peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan lokal melalui platform digital.
- b. Tantangan: Kesenjangan akses teknologi antara wilayah pusat kota dan daerah perbatasan, Kapasitas teknis aparatur belum merata, sehingga beberapa layanan digital berjalan lambat, Adopsi masyarakat terhadap layanan digital masih perlu ditingkatkan, terutama bagi kelompok usia lanjut dan warga yang belum terbiasa teknologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan *Smart Region* Kota Sorong telah melalui proses perencanaan yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga konsultasi publik. Pendekatan partisipatif dan integrasi dengan pemerintah provinsi menunjukkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya keselarasan kebijakan.

Implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa teknologi digital mampu mempercepat layanan publik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan masih terbatas oleh infrastruktur yang belum merata dan kapasitas aparatur yang bervariasi. Hal ini sejalan dengan literatur tentang tantangan *smart governance* di negara berkembang, di mana akses teknologi dan kesiapan aparatur menjadi faktor kritis kesuksesan.

B. Dampak penerapan kebijakan Smart Region terhadap pembangunan daerah di Kota Sorong

1. Dampak terhadap Pelayanan Publik

Penerapan kebijakan *Smart Region* di Kota Sorong berdampak positif terhadap pelayanan publik, antara lain:

- a. Digitalisasi Layanan Administrasi; Layanan kependudukan, perizinan, dan pajak daerah telah terdigitalisasi melalui platform online, Warga dapat mengakses informasi dan mengurus dokumen secara daring, sehingga waktu dan biaya pelayanan berkurang.
- b. Transparansi dan Efisiensi; Sistem digital meminimalkan birokrasi manual, mengurangi risiko kesalahan administrasi, dan meningkatkan akuntabilitas aparatur pemerintah, Laporan pelayanan publik dapat dipantau secara real-time, sehingga keputusan manajerial lebih cepat dan tepat.
- c. Partisipasi Masyarakat; Portal layanan publik memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan, dan saran secara digital. Hal ini mendorong keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan pemerintah.

3. Dampak terhadap Perekonomian Lokal

Penerapan *Smart Region* juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sorong:

- a. Peningkatan Efisiensi Ekonomi; Proses perizinan usaha yang lebih cepat dan transparan mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Pemerintah memanfaatkan data digital untuk perencanaan ekonomi berbasis bukti (*data-driven policy*).
- b. Pengembangan Ekonomi Berbasis Teknologi; Digitalisasi membuka peluang bisnis baru, seperti e-commerce lokal, layanan digital, dan start-up teknologi. Kolaborasi dengan sektor swasta untuk inovasi aplikasi smart city mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD); Peningkatan efisiensi pelayanan dan pengelolaan pajak melalui platform digital berpotensi meningkatkan PAD.

4. Dampak terhadap Infrastruktur Digital

Penerapan kebijakan *Smart Region* mendorong pembangunan infrastruktur digital di Kota Sorong:

- a. Jaringan dan Akses Internet; Peningkatan jaringan internet di kantor pemerintahan, sekolah, dan pusat pelayanan publik. Penyediaan Wi-Fi publik di beberapa titik strategis kota untuk mendukung akses informasi.
- b. Pengembangan Sistem Digital Terintegrasi; Portal layanan publik terintegrasi memungkinkan koordinasi antarinstansi dan mempermudah masyarakat. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital mendukung pengambilan keputusan yang cepat.
- c. Pemanfaatan Data dan Big Data; Data digital digunakan untuk perencanaan pembangunan, analisis kebutuhan masyarakat, dan evaluasi program pemerintah. Tantangan: Infrastruktur digital di distrik pedesaan masih terbatas. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem digital masih menjadi kendala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Smart Region* memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah di Kota Sorong. Pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan partisipatif. Sektor ekonomi mengalami peningkatan melalui efisiensi perizinan dan peluang ekonomi berbasis teknologi. Infrastruktur digital berkembang sebagai fondasi penting untuk mendukung pelayanan dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh kesenjangan infrastruktur digital dan keterbatasan kapasitas masyarakat maupun aparatur. Hal ini sejalan dengan literatur tentang *smart governance* di negara berkembang, yang menekankan pentingnya pemerataan akses teknologi, peningkatan SDM, dan partisipasi warga agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata.

C. Tantangan utama dalam penerapan Smart Region di Sorong, dan bagaimana rekomendasi kebijakan untuk mengatasinya.

1. Tantangan Utama dalam Penerapan Smart Region

Berdasarkan wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, aparatur, dan masyarakat, serta analisis dokumen kebijakan, beberapa tantangan utama dalam penerapan *Smart Region* di Kota Sorong adalah sebagai berikut:

- a. Kesenjangan Infrastruktur Digital; Infrastruktur internet dan teknologi informasi belum merata di seluruh wilayah Kota Sorong, Beberapa distrik pedesaan atau perbatasan mengalami keterbatasan jaringan, sehingga akses ke layanan digital masih sulit, Dampak: Masyarakat di daerah terpencil belum dapat sepenuhnya memanfaatkan layanan publik berbasis digital, menghambat pemerataan pembangunan.
- b. Kapasitas Aparatur Pemerintah; Aparatur pemerintah belum sepenuhnya siap mengelola sistem digital dan layanan berbasis teknologi, Keterbatasan kemampuan teknis mengakibatkan beberapa aplikasi atau portal digital berjalan tidak optimal, Dampak: Efisiensi dan kualitas layanan publik masih bervariasi antarinstansi, meskipun sistem digital sudah tersedia.
- c. Literasi Digital Masyarakat; Tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi layanan digital masih rendah, terutama di kalangan usia lanjut dan masyarakat dengan pendidikan rendah, Dampak: Adopsi layanan digital lambat, sebagian masyarakat tetap mengandalkan layanan konvensional, sehingga tujuan *Smart Region* untuk mempercepat pelayanan belum sepenuhnya tercapai.
- d. Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Sumber Daya; Pengembangan *Smart Region* memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, perangkat lunak, dan pelatihan SDM, Anggaran daerah yang terbatas membatasi kecepatan ekspansi sistem digital ke seluruh wilayah.
- e. Koordinasi Antarinstansi dan Kolaborasi; Implementasi *Smart Region* memerlukan koordinasi yang erat antara Dinas Kominfo, Bappeda, instansi terkait, sektor swasta, dan akademisi, Tantangan: Koordinasi terkadang terhambat oleh birokrasi dan perbedaan prioritas antarinstansi.

2. Rekomendasi Kebijakan untuk Mengatasi Tantangan

Berdasarkan analisis, beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penerapan *Smart Region* di Kota Sorong adalah:

- a. Perluasan dan Pemerataan Infrastruktur Digital; Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memperluas jaringan internet ke

distrik pedesaan dan daerah perbatasan, Penyediaan Wi-Fi publik di fasilitas umum strategis agar seluruh warga dapat mengakses layanan digital.

- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur; Pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah dalam pengelolaan sistem digital dan layanan e-government, Pembentukan tim teknis khusus untuk mendukung operasional dan pemeliharaan sistem Smart Region.
- c. Literasi Digital Masyarakat; Program sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai penggunaan aplikasi digital, melalui workshop, kampanye media sosial, dan penyuluhan di tingkat kelurahan, Penyediaan layanan bantuan (*help desk*) bagi warga yang kesulitan menggunakan sistem digital.
- d. Optimalisasi Anggaran dan Sumber Daya; Alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan SDM, dan pemeliharaan system, Mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dan akademisi untuk inovasi teknologi dengan biaya efisien.
- e. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Antarinstansi; Pembentukan satuan tugas (*task force*) Smart Region yang mengkoordinasikan seluruh pihak terkait, Integrasi sistem antarinstansi agar data dan layanan dapat berjalan sinergis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan *Smart Region* memiliki dampak positif terhadap pembangunan Kota Sorong, tantangan infrastruktur, kapasitas SDM, literasi masyarakat, anggaran, dan koordinasi menjadi hambatan utama.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian lain tentang *smart governance* di negara berkembang, di mana keberhasilan implementasi teknologi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparatur, pemerataan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Dengan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan ini, manfaat Smart Region dapat lebih optimal dan pemerataan pembangunan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Perumusan Kebijakan; Kebijakan *Smart Region* Kota Sorong dirumuskan melalui identifikasi kebutuhan daerah, penyusunan dokumen strategi, konsultasi publik, dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi, Strategi kebijakan mencakup enam dimensi utama yang menekankan digitalisasi layanan, pembangunan ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Implementasi Kebijakan; Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui digitalisasi layanan publik, pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan aparatur, sosialisasi masyarakat, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi, Dampak implementasi positif terlihat pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan akses teknologi dan kapasitas aparatur. Secara keseluruhan, kebijakan *Smart Region* di Kota Sorong menunjukkan potensi signifikan dalam mendorong pembangunan daerah berbasis teknologi, dengan catatan perlunya perhatian terhadap pemerataan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia Pelayanan Publik: Digitalisasi layanan publik meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi Masyarakat, Tantangan masih ada pada adaptasi masyarakat terhadap teknologi dan jaringan internet yang belum merata. Ekonomi Lokal: Smart Region mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, mempercepat perizinan usaha, dan meningkatkan PAD, Kesenjangan digital menjadi hambatan dalam pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat. Infrastruktur Digital: Pengembangan jaringan internet, portal terintegrasi, dan sistem monitoring berbasis digital memperkuat fondasi pembangunan. Pemerataan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas SDM masih perlu menjadi fokus pemerintah. Keseluruhan, kebijakan *Smart Region* di Kota Sorong memiliki dampak positif nyata terhadap pembangunan daerah, namun keberlanjutannya

bergantung pada pemerataan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur, dan literasi digital masyarakat. Tantangan Utama: Kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, Kapasitas teknis aparatur yang belum merata, Rendahnya literasi digital Masyarakat, Keterbatasan anggaran dan sumber daya, dan Koordinasi antarinstansi yang masih perlu diperkuat. Rekomendasi Kebijakan: Perluasan dan pemerataan infrastruktur digital ke seluruh wilayah Kota Sorong. Pelatihan berkelanjutan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah, Program edukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, Optimalisasi anggaran dan kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi, dan Pembentukan *task force* dan integrasi sistem antarinstansi untuk koordinasi yang lebih efektif. Tantangan dalam penerapan *Smart Region* dapat diatasi melalui strategi terpadu yang melibatkan peningkatan kapasitas SDM, pemerataan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan koordinasi antarinstansi, Dengan implementasi rekomendasi ini, Smart Region dapat menjadi pendorong pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, M. Gelar, Nurlaila Syarfiah Asfo, Nazlia Wibowo, Faiz Khaldun, & M. Andika Hariz Hamdallah. (2025). “The Effect of Digital Infrastructure Development on Regional Economic Growth in Indonesia.” *Jurnal Informasi dan Teknologi*.

Anindya Puteri Eka Susilowati, Rini Rachmawati, R. Rijanta. (–). “Analysis of Smart Village Development in Supporting Smart City in Indonesia: A Systematic Review.” *Forum Geografi*.

Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Rayno Dwi Adityo, Siti Zulaichah, Hajar Salamah Salsabila Hariz. (–). “Enhancing Sustainable Development Efficiency Through a Single Smart City Platform: A Cost-Benefit Policy Perspective from Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.

Marlon Naibaho. (–). “Regional Innovation Policy in Encouraging Regional Competitiveness in South Tangerang City.” *Jurnal Bina Praja*.

Si Ying Tan, Araz Taeihagh. (2020). “Smart City Governance in Developing Countries: A Systematic Literature Review.” *arXiv*.

Repo. (–). “Arahan Kebijakan Pengembangan Smart Governance di Kota Metro.” (Laporan / tesis)

Iman Sururi, Ronald Salomena, Hendry Jerry Jantje. (–). “Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.” *J-mace: Jurnal Penelitian*.

Latakay, A., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2017). “Analisa Dampak Pemekaran Daerah di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.” *Jurnal GRADUAL: Governance Administration and Public Service*.

La Basri, Felix Fransiskus Sagrim, Satu Satu, Rusdi Rusdi. (–). “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Pasar Modern Rufei Kota Sorong.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*